

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kegiatan investasi pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kebijakan ekonomi makro, aspek sosial dan politik serta aspek bisnis. Persoalan investasi bukan lagi semata-mata tentang masalah ketersediaan modal maupun sumber daya yang dapat menjadi pendorong masuknya modal ke suatu daerah atau negara. Perkembangan dan pertumbuhan lingkungan usaha menjadi variabel penting bagi masuknya modal di suatu daerah. Lingkungan usaha dan investasi yang tidak kondusif dan tidak sehat bukan hanya dapat menghambat masuknya modal ke daerah tersebut, namun juga dapat menyebabkan modal yang sudah ada juga berhenti dan beralih ke luar daerah.

Kegiatan investasi sangat diperlukan kehadiran baik dari para pemodal domestik maupun asing karena keterbatasan kemampuan dana pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan berkembangnya investasi diharapkan untuk perluasan usaha maupun penciptaan lapangan kerja guna mengatasi pengangguran semakin meningkat.

Menurut Noor (2009) dalam Frisyelia (2016), investasi adalah mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk mendapatkan manfaat di masa datang. Investasi memiliki dua aspek, yaitu : konsumsi saat ini, dengan harapan dapat keuntungan dimasa datang. Secara konsep, investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumberdaya (*resources*) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang) (Frisyelia, dkk, 2016:346). Sedangkan menurut Malinda (2011:1) dalam Pipit (2016) Investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Menurut Halim

yang dikutip oleh Fahmi dan Hadi (2011:4) dalam Pipit (2016), investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Sedangkan menurut Kasmir dan Jakfar (2012) dalam Pipit (2016), investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai usaha (Pipit, 2016:857).

Sehubungan dengan investasi diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Provinsi Jawa Tengah. Sebagai dasar pengaturan investasi maka pemerintah membuat UU no. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA).

Pada dasarnya sifat usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah adalah menyediakan pelayanan perizinan dan investasi bagi masyarakat ataupun para investor yang ingin berinvestasi di Jawa Tengah. Wilayah Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini adalah se- Provinsi Jawa Tengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini hanya melayani pelayanan perizinan dan investasi yang berjumlah besar sedangkan jika investasi tersebut berjumlah kecil maka yang melayani Dinas Penanaman Modal kabupaten.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Jawa Tengah sesuai dengan kebijakan penanaman modal Jawa Tengah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengadaan barang/ jasa, maka tugas akhir ini disusun dengan judul **“MEKANISME PENGADAAN BARANG/ JASA DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAWA TENGAH”**

## **1.2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan, dan agar pembahasannya tidak meluas atau melebar maka diperlukan ruang lingkup permasalahan. Dengan adanya ruang lingkup diharapkan pembahasan dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sehingga dalam penyusunan tugas akhir ini pembahasan akan dibatasi mengenai pengadaan barang/ jasa dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi jasanya (asset perusahaan). Dimana didalamnya dibahas mengenai:

1. Metode pengadaan barang/ jasa dengan penunjukan langsung.
2. Fungsi yang terkait yang digunakan dalam pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung.

3. Metode penilaian kualifikasi dan metode evaluasi penawaran dalam pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung.
4. Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung.
5. Dokumen yang digunakan dalam pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung.
6. Prosedur pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung.
7. Bagan alir prosedur pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai mekanisme pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengaplikasikan teori yang telah diterima penulis selama menuntut ilmu di Universitas Diponegoro khususnya yang berhubungan dengan sistem dan mekanisme pengadaan barang/ jasa.

#### **1.3.2. Kegunaan Penulisan**

Kegunaan yang didapat dari penulisan tugas akhir ini, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mengasah kemampuan dan keterampilan dalam menetapkan teori yang telah diperoleh dari praktek dalam dunia kerja.

### b. Bagi Perusahaan

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan pengawasan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung.

### c. Bagi Universitas Diponegoro

Sebagai tambahan referensi dan informasi dalam penyusunan tugas akhir yang berhubungan dengan pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung.

## 1.4. Cara Pengumpulan Data

### 1.4.1. Data Penelitian (Data Primer/ Sekunder)

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini dibutuhkan data-data dan informasi yang akurat sehingga dapat menjamin kebenaran dan mendukung penyusunan laporan ini. Menurut Etta (2010), sumber penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Etta, 2010: : 171-172).

#### 1. Data Primer

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Ada dua

metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data primer, yaitu: metode survei dan metode observasi. Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

2. Data sekunder

Adapun data yang diperoleh disini adalah data dari literatur, buku, artikel dari media cetak yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti sebagai pelengkap data primer.

#### 1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut

1. Metode Observasi (*Observation*)

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Etta, 2010: 171-172). Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei adalah data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan bebas dari *response bias*. Dalam metode ini, penulis melakukan pengamatan pada fungsi, visi dan misi, tugas kerja dan tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Etta, 2010: 171). Teknik wawancara

dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: melalui tatap muka atau melalui telepon.

Dalam metode ini, penulis melakukan proses wawancara melalui tatap muka dan melalui telepon. Proses wawancara melalui telepon dilakukan untuk mendukung kelengkapan proses wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka karena data yang digunakan oleh penulis berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang berasal dari media cetak. Penelitian kepustakaan berarti mengutamakan penggunaan perpustakaan, tempat peneliti memperoleh data-data atau informasi tentang objek penelitian maupun buku-buku dan alat audio visual lainnya (Semi, 1993: 8). Data utama yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi perusahaan, buku pedoman, Perundang-undangan maupun buku perkuliahan dan juga referensi lain yang mendukung topik pengadaan barang/ jasa. Sementara itu, data lainnya berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan hal yang dibahas, selain itu beberapa informasi diperoleh dari internet.

Metode studi pustaka ini dapat menghasilkan informasi dan data yang mengarah pada suatu analisis. Setiap masukan dapat mendukung dan mengarah kepada mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi dari pembahasan ini, maka diperlukan adanya sistematika yang baik. Penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

#### **BAB II                   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, pelayanan, rencana umum penanaman modal, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

#### **BAB III                TINJAUAN TEORI dan PRAKTEK**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan teori yang digunakan yang berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa, metode pemilihan penyedia barang/ jasa, metode penunjukan langsung, fungsi yang terkait, dan dokumen yang digunakan serta bagan alir dokumen, prosedur pengadaan barang/ jasa, dokumen yang digunakan dan catatan akuntansi yang digunakan.

Sedangkan dalam tinjauan praktik berisi tentang deskripsi pengadaan barang/ jasa, metode pengadaan barang/ jasa, fungsi yang terkait, metode penilaian kualifikasi, metode evaluasi penawaran, penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung, dokumen yang digunakan, prosedur pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung, bagan alir prosedur pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung, dokumen yang digunakan, kelebihan dan kelemahan.

**BAB IV            PENUTUP**

Berisi ringkasan hasil pembahasan sebelumnya terutama dari BAB III mengenai sistem pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung sehingga dapat memberikan gambaran terhadap pembahasan yang diangkat.